

**Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup  
Terhadap Pabrik Yang Mencemari Air Sungai Berdasarkan  
Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011**

Faizal Nur Bachtiar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Faizal\_bachtiar@ymail.com

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik yang Mencemari Air Sungai Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 dan untuk mengetahui serta menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan data langsung dari lapangan dengan wawancara kepada warga sekitar di Desa Jatilengger. Pada Hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup masih belum optimal karena terdapat hambatan-hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya beberapa hambatan dari internal dan eksternal. Hambatan internal diantaranya masih kurangnya komitmen pemerintah dalam hal menegakkan hukum lingkungan, sarana dan prasarana yang masih belum memadai, laboratorium yang masih belum mempunyai sertifikat. Hambatan eksternal diantaranya masih kurangnya kesadaran pengusaha dan masyarakat di bidang penegakan hukum, sumberdaya masyarakat, kebiasaan pola hidup masyarakat, biaya pengolahan limbah yang relative mahal. Dengan demikian upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tersebut adalah memberikan sosialisasi UU 32 Tahun 2009, melengkapi sarana dan prasarana, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat penegakan lingkungan.

Kata kunci : penegakan hukum, pencemaran air, Badan Lingkungan Hidup

**Environmental Law Enforcement By Environment Agency  
Against Polluting Factory The Rivers Under Water  
Regulation No. Regent Blitar . 46 In 2011**

Faizal Nur Bachtiar , Faculty of Law, University of Brawijaya  
Email : Faizal\_bachtiar@ymail.com

**ABSTRACT**

This research aims to find out and analyse the implementation of Environmental law enforcement by the Environmental Protection Agency Against factory Polluting river water based on Regulation No. 48 Regent of Blitar in 2011 and to find out and analyze any barriers faced by the environmental agency of the District of Blitar. This research was conducted by using the juridical sociological methods. The Data used are the primary and secondary data in Blitar Regency, Environmental Agencies and data directly from the field with an interview to the local people in the village of Jatilengger. On the results of the research have been able to note that the environmental law enforcement carried out by the Environment Agency is still not optimal because there are obstacles in the field. These barriers are some of the internal and external barriers. Internal barriers are still lack of Government's commitment in terms of enforcing environmental law, facilities and infrastructure are still not memadai, still do not have a laboratory certificate. External obstacles which still lack of keasadaran entrepreneurs and communities in the field of law enforcement, community resources, community living habits, the cost of processing waste relative expensive. Thus attempts are made of the environmental agency of the Blitar District is giving the socialization ACT 32 of 2009, complete infrastructure, provides an opportunity to employees to follow the training of environmental enforcement.

Keyword: law enforcement, water pollution, environmental protection Agency

## **A. Pendahuluan**

Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup adalah suatu landasan hukum untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan dan untuk melestarikan lingkungan hidup agar serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya pengendalian dan sikap untuk melindungi terhadap lingkungan hidup, agar terwujudnya keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup. Terwujudnya keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup, menjadikan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Akan tetapi kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup tidak dapat dihindari. Pencemaran pada lingkungan hidup pada saat ini memang masih belum berdampak besar pada ekosistem di bumi. Akan tetapi dari hal kecil pada diri atau masing – masing individu tersebut, apabila kesadaran akan kepedulian lingkungan tersebut tidak kunjung ada, maka hal ini akan berdampak besar di masa mendatang. Lambat laun maka efek dari bahan–bahan yang mencemari dan merusak lingkungan tersebut akan berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.

Kabupaten Blitar adalah Kabupaten yang terkenal dengan pabrik-pabrik makan ringan yang berbasis dirumah ( *home industry* ). Kabupaten Blitar memiliki banyak tempat pabrik pembuatan tahu, sambal pecel, geti dan lain-lain. Meskipun hanya berbasis pabrik dan tidak sebesar industri seperti di kota besar, akan tetapi dari banyak pabrik-pabrik tersebut, tetap diperlukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melaksanakan program pelestarian kemampuan lingkungan. Karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan program nasional maka dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin oleh seorang menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dilakukan oleh departemen atau lembaga non departemen baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah oleh instansi vertikal. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui jalur Sekwilda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) dan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang diharapkan agar tercapai kesatuan pendapat dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan program pelestarian kemampuan lingkungan terutama dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam menjaga tatanan agar lingkungan hidup tidak tercemar, tidak bisa hanya dari peran Pemerintah Daerah setempat yang menangani. Peran serta dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Di dalam instansi pemerintah, yang bertugas menangani tatanan lingkungan hidup wilayah perkotaan atau kabupaten yaitu Badan Lingkungan Hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terkait pencemaran air sungai di Desa Jatilengger

berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar?

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup di dalam melakukan penegakkan hukum lingkungan terhadap pencemaran air di Desa Jatilengger?
3. Apa upaya yang seharusnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Desa Jatilengger?

### **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui secara faktual segala yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Blitar karena Kabupaten Blitar merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak bermata pencaharian sebagai wiraswasta seperti mendirikan pabrik-pabrik kecil atau home industri. Berbagai macam usaha mendirikan pabrik, maka berbagai macam masalah pula yang timbul dari banyaknya pabrik yang ada di Kabupaten Blitar. Berbagai macam pabrik yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran sungai di Kabupaten Blitar. Salah satunya di Desa Jatilengger yang pada kali ini menjadi obyek penelitian oleh penulis. Data primer adalah data yang diperoleh dari pendapat dan pengalaman Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang berhubungan langsung dengan pihak yang menjadi bahan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang diperoleh dari suatu instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengumpulan data, serta Tanya jawab lisan dengan responden. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil

pengamatan dilapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan member kesimpulan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Gambaran Umum Kabupaten Blitar**

Penentuan titi mangsa lahirnya Blitar sebagai pusat pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar. Dari berbagai prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik seperti terurai atas, tidak terdapat sebuahpun yang memuat nama Blitar sebagai nama tempat Pusat Pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama desa atau tempat yang disebutkan dalam prasasti-prasasti itu berada atau termasuk wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa (sebagian) daerah Blitar sejak sepuluh abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Berita agak pasti mengenai pertumbuhan Blitar sebagai Pusat Pemerintahan mulai ada sejak awal pemerintahan Raja-raja Majapahit. Sebagaimana dapat dibuktikan dalam sejarah Kerajaan Majapahit lahir setelah Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Tartar Ku Bilai Khan pada Tahun 1293 M. (Pararaton : 33)

Majapahit sebagai negara baru berpusat di dekat Mojokerta. Di bawah pimpinan raden Wijaya sebagai Raja pertama, negara Majapahit tumbuh dengan pesat. Suatu hal yang menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peninggalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari.

Pada bangunan itu terdapat angka Tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi.<sup>1</sup> Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan Pemerintah Raja Pertama Majapahit. Kenyataan di atas membuktikan bahwa

---

<sup>1</sup> Knebel : 1908 : hal. 355

sejarah Blitar pada awal abad ke – XIV masih menunjukkan wilayah yang penting. Hubungan pendirian bangunan suci itu dengan sejarah daerah ini mendapatkan suatu petunjuk yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu antara lain terdapat sejumlah Prasasti dari masa abad ke – XII Masehi di daerah sepanjang lembah Gunung Kawi sebelah Barat. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih dapat dibuktikan hingga sekarang dengan adanya beberapa perkebunan. Faktor alamiah yang menguntungkan ini menyebabkan adanya kehidupan masyarakat yang makmur. Kemakmuran itu mendorong pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu singkat. Walaupun tidak terdapat catatan tentang jumlah penduduk di daerah bagian Timur ini, namun dapat diperkirakan bahwa dengan adanya tenaga manusia maka daerah ini menjadi penting. Tersedianya tenaga manusia yang cukup besar, merupakan salah satu jaminan pergerakan pasukan secara mudah untuk suatu tujuan pertahanan maupun serangan.

Seperti halnya dalam prasasti Tuhanyaru yang menyebutkan adanya anugrah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan berhubung yang bersangkutan telah berjasa kepada raja, maka prasasti Blitar pun memuat pernyataan yang sama. Dapat diketahui bahwa hubungan antara raja Jayanegara dengan daerah Blitar mempunyai sifat yang istimewa. Hubungan yang istimewa itu diperlihatkan pada penempatan sejumlah pejabat yang diberikan kepada para pejabat, berhubung dengan kesetiyaan desa Blitar kepada raja.

Demikian sekilas mengenai sejarah Kabupaten Blitar yang dimana dulu pemerintahannya berawal dari kerajaan, dan sekarang sudah menjelma sebagai Pemerintahan dan diberi kewenangan sendiri oleh pusat, dengan sebutan otonomi daerah dan berkembang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kabupaten Blitar mengalami berbagai banyak hal kemajuan dalam bidang pembangunan, baik pembangunan fisik dan non fisik.

## **b, Letak Daerah**

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.



## **2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar**

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi<sup>2</sup>**

#### **a.) Tugas Pokok :**

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

#### **b.) Fungsi :**

- Perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan bidang Lingkungan Hidup
- Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang lingkungan hidup
- Pelaksanaan, Pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup.
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup.
- Penyelenggaraan Urusan kesekretariatan pada Badan Lingkungan Hidup;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- Pengkoordinasian, integrasi dan Sinkronisasi kegiatan bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan bidang Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **b. Struktur Organisasi**

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Perbup No. 46 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan lingkungan Hidup terkait dengan upaya mengatasi pencemaran lingkungan di Kabupaten Blitar

---

<sup>2</sup> [http://blhblitar.ppejawa.com/32\\_tugas\\_pokok\\_dan\\_fungsi.html](http://blhblitar.ppejawa.com/32_tugas_pokok_dan_fungsi.html)

maka pertama ini penulis sajikan gambaran umum dari Badan Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan Sultan Agung No.66 Kota Blitar. Dalam Badan ini yang merupakan suatu Badan yang dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan kebijakan yang bekerja di bidang pelestarian lingkungan hidup. Dalam kegiatannya yang telah terorganisir Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar harus bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan Peningkatan dan Perencanaan strategis di dalam melestarikan lingkungan hidup. Selain itu juga Badan ini memiliki sasaran untuk memperoleh Adipura yang sebagaimana merupakan prestasi dan apresiasi atas apa yang di peroleh dari suatu Kota / Kabupaten di dalam memajukan dan meningkatkan

pelestarian lingkungan Hidup. Di dalam Badan ini memiliki seorang pimpinan yang bernama ir. M. KRISNA TRIATMANTO, M.Si.<sup>3</sup>

Susunan organisasi atau struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Terdiri Dari :

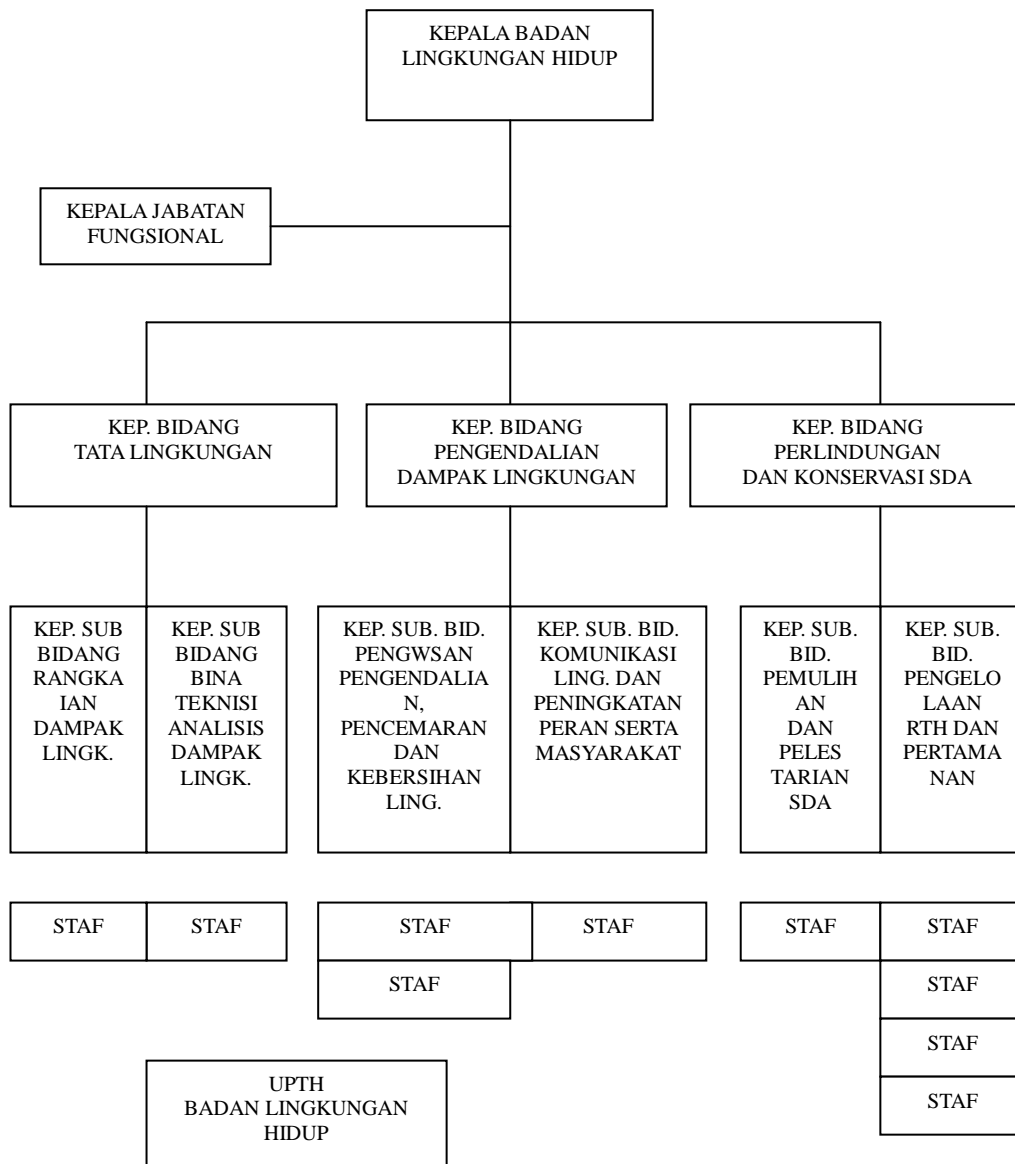
- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang
- d. Kepala Sub. Bidang
- e. Staf-staf

---

<sup>3</sup> [http://blhblitar.ppejawa.com/31\\_struktur\\_organisasi\\_blh.html](http://blhblitar.ppejawa.com/31_struktur_organisasi_blh.html)

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BLITAR<sup>4</sup>**

PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 46 TH 2011  
 TGL : 8 DES 2011



<sup>4</sup> [http://blhblitar.ppejawa.com/31\\_struktur\\_organisasi\\_blh.html](http://blhblitar.ppejawa.com/31_struktur_organisasi_blh.html)

### 3. Pelaksanaan Penegakkan hukum

Badan Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepada para masyarakat atau pelaku usaha yaitu dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar. Sanksi tersebut yaitu Sanksi administrasi, pidana dan perdata. Akan tetapi Badan Lingkungan Hidup lebih menekankan pada sanksi administrasi guna menegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Sanksi administrasi dirasa cukup membuat para pelaku usaha jera untuk melakukan tindak kejahatan dengan menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup.<sup>5</sup>

Sanksi administrasi pada utamanya mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administrasi yaitu :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- 3) Uang paksa
- 4) Penutupan tempat usaha
- 5) Penghentian Kegiatan mesin perusahaan
- 6) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa

Sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup ini seharusnya jangan hanya dengan teguran tertulis saja, akan tetapi perlu dilakukan paksaan pemerintah atau tindakan paksa, agar para pelaku usaha sadar bahwasanya yang dilakukan dengan perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang banyak dan dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar.

Dalam Badan ini yang merupakan suatu Badan yang dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan kebijakan yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada tanggal 28 November 2013

bekerja di bidang pelestarian lingkungan hidup. Dalam kegiatannya yang telah terorganisir Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar harus bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan Peningkatan dan Perencanaan strategis di dalam melestarikan lingkungan hidup. Selain itu juga Badan ini memiliki sasaran untuk memperoleh Adipura yang sebagaimana merupakan prestasi dan apresiasi atas apa yang di peroleh dari suatu Kota / Kabupaten di dalam memajukan dan meningkatkan pelestarian lingkungan Hidup. Di dalam Badan ini memiliki seorang pimpinan yang bernama ir. M. KRISNA TRIATMANTO, M.Si.<sup>6</sup> Dari struktur organisasi tersebut yang memiliki beberapa bidang yang telah dibagi-bagi untuk memudahkan optimalnya kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. adapun jumlah keseluruhan Staf atau karyawan yang ada di dalamnya ada sekitar 85 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang digunakan untuk mengoptimalkan pelestarian lingkungan hidup serta perencanaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi

#### **4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar didalam menegakkan hukum lingkungan**

Dalam menegakkan hukum pada msyarakat , selalu ada hambatan – hambatan yang di alami pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Hambatan tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti :

- Hambatan internal

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah berawal dari pemerintahan itu sendiri. Pada pemerintahan apabila masih adanya kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di dalam menangani

---

<sup>6</sup> [http://blhblitar.ppejawa.com/31\\_struktur\\_organisasi\\_blh.html](http://blhblitar.ppejawa.com/31_struktur_organisasi_blh.html)

kasus pencemaran lingkungan. Kurangnya tenaga PPNS dan PPLH di Badan Lingkungan Hidup juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.

- Hambatan eksternal

Hambatan – hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Blitar juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyank yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang sudah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan tersebut sudah mengakar tumbuh di masyarakat dan menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjaadi pencemran lingkungan. Biaya operasional yang digunakan untuk mengolah limbah industry sebelum dibuang ke alam, dirasa juga menjadi faktor hambatan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Di dalam penyelenggaraan pemerintah, warga sebagai pihak yang ikut andil di dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

## **5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di dalam menangani pencemaran lingkungan di Desa Jatilengger.**

Pembinaan dan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 kepada masyarakat dari pemerintah daerah khususnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

cukup mendapat tanggapan positif. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar juga berupaya untuk membuat peraturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup ( Perda, Perbup dan Keputusan Bupati ). Dalam upaya menegakkan hukum lingkungan lainnya yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga menerbitkan izin HO, mewajibkan pengusaha untuk menyusun dokumen lingkungan seperti ( AMDAL, UKL-UPL, SPPL ) yang ditujukan ke para pengusaha sebagai komitmen pengelola lingkungan hidup. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup juga terus diupayakan Badan Lingkungan Hidup untuk mengisi kekosongan tenaga dibidang uji laboratorium. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang digunakan untuk penunjang didalam menegakkan hukum lingkungan.

## **Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan oleh badan lingkungan hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan menggunakan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi ini dirasa masih belum cukup untuk membuat efek jera kepada pelaku usaha di Kabupaten blitar khususnya di Desa Jatilengger. Hal itu diperkuat dengan masih adanya kasus-kasus yang terjadi dan sanksi administrasi terbukti belum mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

Bahwa pembuktian dengan hasil laboratorium sudah terlaksana, akan tetapi masih belum di imbangi dengan sarana laboratorium milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sendiri yang masih belum bersertifikat. Ditambah dengan masih belum adanya staf atau pegawai yang mengisi tempat sebagai aparat yang ditugaskan di laboratorium dan pejabat PPLH juga masih satu.

Bahwa pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum masih belum seratus persen diberikan kepada aparat penegak hukum. Karena Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mnganggap sudah cukup dengan diberikan sanksi administrasi. Akan tetapi sanksi administrasi masih belum bisa menajdi efek jera bagi para pelaku usaha.

Bahwa Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dalam pelaksanaanya sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi kurangnya jumlah aparat dan masih belum di dukungnya sarana dan prasarana dan masa pemantauan yang dibilang terlalu panjang, maka hal ini yang dirasa efektivitas Badan Lingkungan Hidup masih perlu dikaji kembali.

2. Hal-hal yang menghambat dalam penegakan Hukum Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu :
  - a. Adanya permainan politik di pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Pengusaha/pemilik modal biasanya dekat dengan pejabat sehingga tidak jarang setiap kasus selalu berhenti ditengah jalan.
  - b. Kurangnya tenaga ( PPNS & PPLH ) dibidang lingkungan hidup, yang mempunyai tugas untuk uji laboratorium.
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan uji laboratorium dan penegakan hukum lingkungan



- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola lingkungan secara baik sesuai dengan peraturan lingkungan hidup.
  - e. Kurangnya tingkat pengetahuan dan Sumber Daya Masyarakat di dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
  - f. Masih adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat
  - g. Mahalnya biaya untuk pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai atau lingkungan.
3. Upaya terkait hambatan-hambatan yang terjadi didalam penegakan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran air sungai di Desa Jatilengger :
- a. Membuat peraturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Perda, Perbup,dan Keputusan Bupati)
  - b. Menerbitkan ijin gangguan tertentu/HO
  - c. Mewajibkan pengusaha untuk menyusun dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL-UPL, SPPL ) sebagai komitmen pengusaha untuk pengelolaan lingkungan.
  - d. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
  - e. Melengkapi sarana dan prasarana yang difungsikan untuk membantu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar di dalam menegakan hukum lingkungan.
  - f. Melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai penegakan hukum lingkungan oleh badan lingkungan hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011, disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lebih tegas menerapkan sanksi administrasi yang seharusnya. Apabila memang perlu dengan sanksi pidana , maka sanksi pidana juga harus diterapkan dengan memberikan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan harus diselesaikan secara cepat, sehingga sumber daya alam akan aman dari pencemaran lingkungan hidup.
- 2) Agar badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memenuhi sarana dan prasarana ditambah harus segera membuat Peraturan Daerah mengenai lingkungan hidup. Sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan dapat segera teratasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nursamsi. 2002, **Upaya Pemerintah Daerah (Camat) Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan**
- Syahrul Machmud, 2012, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, ( Yogyakarta: Graha Ilmu )
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, **Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya
- Takdir Rahmadi, 2012, **Hukum Lingkungan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 2002, **Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggualannya**, PT RINEKA CIPTA, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Blitar
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Blitar, Kantor Lingkungan Hidup 2009

### **Internet**

- <http://www.blitarkab.go.id/?p=272>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013

<http://mayangkararadio.com/lang-lang-kota/sosial-politik/item/889-pemerintah-kabupaten-blitar-didesak-untuk-segera-tuntaskan-masalah-pencemaran-air-jatilengger>, diakses pada tanggal 20 September 2013

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 26 September 2013

<http://www.konsultankolesterol.com/artikel-pencemaran-lingkungan/>, diakses pada tanggal 29 September 2013

<http://id.scribd.com/doc/57310777/implementasi-adalah>, diakses pada tanggal 3 November 2013

<http://www.pitikkedu.net/2012/11/pengertian-limbah.html>, diakses pada tanggal 3 November 2013

<http://ridwanaz.com/umum/biologi/mengenal-limbah-industri-dan-berbagai-dampak-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses pada tanggal 5 November 2013

<http://jujubandung.biz/2013/07/04/sebab-akibat-pencemaran-air/>, diakses pada tanggal 5 November 2013